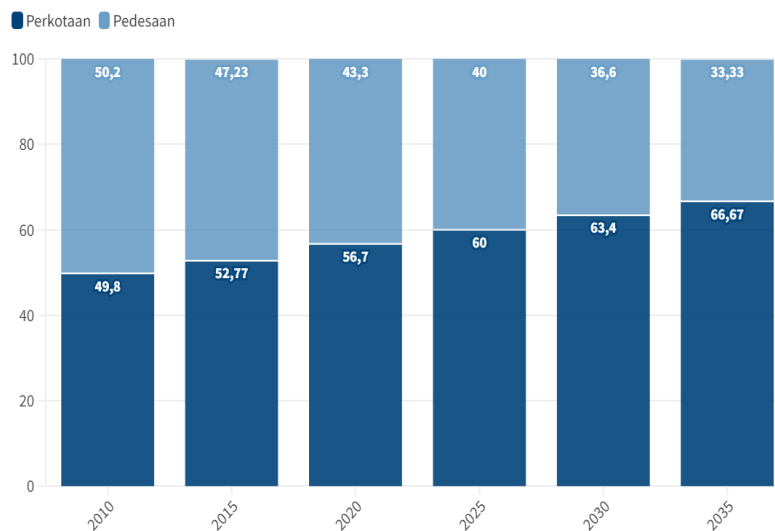


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik (2020) jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan adalah sebanyak 56,7%. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Selain data BPS, Bank Dunia juga memperkirakan bahwa pada tahun 2045, sebanyak 220 juta orang atau sekitar 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Perkiraan ini diduga karena pertumbuhan urbanisasi Indonesia yang begitu pesat dan mengalami pertumbuhan urbanisasi sebesar tiga persen setiap tahunnya (Safitri and Pradipta 2023).



**Gambar 1. 1 Prediksi Persentase Penduduk Daerah Perkotaan dan Pedesaan
Indonesia 2010-2035**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi akan berdampak pada ketersediaan lahan di perkotaan. Masyarakat akan membutuhkan tempat tinggal, sehingga lahan-lahan kosong akan digunakan sebagai tempat untuk membangun permukiman perumahan. Hal ini akan menimbulkan kepadatan pemukiman dan penduduk serta semakin minimnya lahan kosong di perkotaan (Sabitha, 2022).

Kepadatan penduduk pada suatu kota sering kali menjadi pemicu terjadinya berbagai permasalahan, salah satunya tekanan pada lahan dan infrastruktur yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru dengan munculnya permukiman kumuh (Farista & Cahayani, 2024). Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan kumuh adalah permukiman dengan kondisi fisik dan non-fisik yang tidak layak huni, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kondisi bangunan: bangunannya sudah tidak layak huni, padat dan akses jalannya sempit
2. Infrastruktur: akses terhadap air kurang, ketersediaan sanitasi dan pengelolaan persampahannya juga tidak memadai
3. Kesehatan: akses terhadap pelayanan kurang dan angka penyakit di daerah tersebut tinggi
4. Sosial Ekonomi: tingginya kemiskinan, pengangguran dan tindakan kriminalitas

Permasalahan kawasan kumuh menjadi permasalahan kompleks selain karena ketersediaan fasilitas fisik dan non fisiknya yang kurang ataupun tidak memadai,

masyarakat di daerah tersebut juga cenderung memiliki kemampuan ekonomi yang rendah. Sehingga tidak mampu membeli atau membangun hunian yang lebih layak.

Secara umum, beberapa masalah yang dihadapi kawasan permukiman kumuh adalah luas bangunan yang sangat sempit dan kondisinya tidak memenuhi standar kesehatan dan kehidupan sosial, rumah saling berhimpitan dan rawan dengan bencana kebakaran, akses air bersih sangat kurang, jaringan listrik yang tidak cukup dan ruwet, kualitas drainase yang buruk dan jalanan sempit serta akses sarana MCK yang masih kurang. Masalah permukiman kumuh ini akan menyebabkan terjadinya penyakit sosial, kerawanan, dan penurunan produktivitas penduduk (Suharto and Si 2020).

Pertumbuhan urbanisasi yang pesat didominasi oleh sejumlah kota besar di Indonesia termasuk Kota Semarang. Beberapa faktor yang menjadi alasan banyaknya masyarakat tertarik untuk tinggal di Kota Semarang yaitu karena lokasinya yang strategis sebagai kawasan lalu lintas antar daerah di Pulau Jawa (Ahlyar 2020). Selain itu, Kota Semarang memiliki kelengkapan fasilitas mulai dari fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sarana prasarana yang dianggap jauh lebih lengkap dibandingkan daerah di sekitarnya. Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah menjadi salah satu alasan ketersediaan fasilitas dan pembangunannya yang jauh lebih maju dibandingkan daerah di sekitarnya (Ahlyar 2020).

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Kota Semarang adalah 1.653.524 jiwa di tahun 2020, kemudian naik menjadi 1.656.564 jiwa di tahun 2021, dan 1.659.975 di tahun 2022. Jumlah penduduk ini tidak sebanding dengan luas wilayah yang mengakibatkan terjadi kepadatan penduduk yang tinggi di

kawasan perkotaan. Tingginya jumlah penduduk di Kota Semarang menyebabkan banyak rumah dengan kondisi yang seadanya, bahkan ada yang tanpa sanitasi yang memadai diperparah dengan kurangnya kedisiplinan dalam hal kebersihan. Hal tersebut disampaikan mantan Walikota Pemerintah Kota Semarang (Kompas.Com 2019). Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan permukiman kumuh di perkotaan (Sari & Ridlo, 2022). Selain faktor tersebut, pertumbuhan kawasan permukiman kumuh dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, kualitas bangunan, ketersediaan lahan, akses terhadap sarana prasarana. Hal inilah yang ditemukan di Kota Semarang, persoalan permukiman kumuh yang ada di Kota Semarang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai kemampuan ekonomi yang rendah, bencana rob dan banjir, peningkatan jumlah warga di titik tertentu, permasalahan drainase, masalah *crossing* saluran air di pasar dan tata kota (Ahyar 2020).

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 menetapkan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan harus diperhatikan dengan adanya penanganan terkait kualitas permukiman yang kumuh, dan pencegahan terjadinya pertumbuhan kawasan permukiman kumuh baru. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu sasaran yang ingin diwujudkan yaitu terwujudnya kota tanpa kumuh di tahun 2019. Sehingga, untuk mewujudkan sasaran itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginisiasi pembentukan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini dibentuk untuk mendukung dan mendorong pemerintah di tingkat daerah sebagai pemeran utama dalam penanganan kawasan dan

permukiman kumuh untuk dapat mewujudkan permukiman yang layak dihuni untuk masyarakat (SE No: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh).

Program KOTAKU merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 34 provinsi yang tersebar di 217 Kab/Kota yang masuk dalam basis penanganan permukiman kumuh. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membangun kerja sama dan kolaborasi yang bersinergis antara pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Harapannya, program KOTAKU menjadi upaya strategis percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh untuk mendukung gerakan 100-0-100 yang artinya dengan program ini diharapkan tercapainya 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Lewat program KOTAKU diharapkan pemerintah daerah sebagai nahkoda penyedia pelayanan publik di daerah bisa mewujudkan permukiman yang layak huni dengan melakukan pengembangan dan revitalisasi peran dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di daerahnya masing-masing (Website Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman n.d. diakses April 2024)

Kota Semarang adalah salah satu kota yang menjadi basis penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai arahan di RPJMN 2015-2019. Dalam pelaksanaan program KOTAKU, pemerintah daerah Kota Semarang mendapat bantuan perbaikan infrastruktur dari pemerintah pusat (Zethary and Purnaweni 2019). Lewat program ini, harapannya dapat mengatasi masalah kumuh dengan lebih cepat di Kota Semarang dengan adanya kolaborasi antar berbagai pihak

terkait. Kegiatan dari program KOTAKU menggunakan pendekatan Tridaya (Suharto and Si 2020). Pendekatan ini maksudnya dalam pelaksanaan program KOTAKU perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dengan memberikan pengembangan kapasitas lewat pelatihan dan juga pendampingan, meningkatkan kualitas lingkungan dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana primer dan juga perbaikan rumah yang tidak layak huni, serta meningkatkan perekonomian masyarakat lewat adanya *chanelling* terhadap program lain dari PUPR di tingkat daerah (Suharto and Si 2020). Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat mengatasi masalah kawasan kumuh salah satunya di Kota Semarang.

Pelaksanaan program KOTAKU di Kota Semarang pada awalnya dilaksanakan dengan berpedoman pada SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang yang menyatakan ada sebanyak 415,83Ha kawasan kumuh di Kota Semarang yang tersebar di 15 Kecamatan (Sitorus dalam Sahara et al., 2023). Di dalam rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang periode tahun 2016-2021, disebutkan bahwa seharusnya pengentasan kawasan kumuh di Kota Semarang dituntaskan pada tahun 2019 sesuai dengan arah kebijakan Walikota Semarang dan target pengentasan kawasan permukiman lewat program KOTAKU. Namun, di Kota Semarang target tersebut belum tercapai. Berdasarkan data terbaru, dikutip dari Kompas.com, total kawasan permukiman kumuh tahun 2024 di Kota Semarang adalah seluas 178,11 hektar. Walikota Semarang mengatakan upaya terus dilakukan beriringan dengan peningkatan

sanitasi lingkungan dan rencana program kerja pemerintah yang sedang diajukan ke Kementerian Keuangan (Kompas.com 2024).

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, belum semua daerah di Kota Semarang yang bebas dari kawasan kumuh (0%), hanya Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Ngaliyan yang sudah tidak memiliki kawasan kumuh (RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026). Artinya, beberapa kecamatan lainnya belum mencapai target 0% kawasan kumuh salah satunya Kecamatan Semarang Utara.

Pada tahun 2020-2022, pelaksanaan KOTAKU kembali dilakukan dengan adanya pembentukan Pokja KOTAKU (Joanne Endamia Ameita Purba 2021). Tahun 2021, Walikota Semarang memperbaharui kembali SK Kumuh dengan mengeluarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang sebagai acuan dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Dari SK tersebut, Kecamatan Semarang Utara menjadi salah satu daerah prioritas yang perlu penanganan kawasan permukiman kumuh. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, Kecamatan Semarang Utara memiliki kawasan kumuh terluas dan masuk kategori kumuh berat (Perkim,id, 2020). Pada tahun 2018, dari 120,91 ha kawasan kumuh di Kota Semarang, 111,91 ha berada di Kecamatan Semarang Utara, yang merupakan 92,56% dari semua permukiman kumuh di Kota Semarang (Seruntingrum 2022).

Kecamatan Semarang Utara terdiri dari sembilan kelurahan yaitu Panggung Lor, Panggung Kidul, Bulu Lor, Plombokan, Kuningan, Purwosari, Dadapsari,

Bandarharjo, dan Tanjung Mas. Pemugaran kawasan permukiman kumuh dilaksanakan di lima delineasi kumuh di Semarang Utara yaitu Kuningan, Dadapsari, Bandarharjo, Panggung Kidul dan Tanjung Mas (Rosellasari and Subowo 2019). Berikut disajikan data luas perumahan dan permukiman kumuh di lima kelurahan delineasi kumuh di Kecamatan Semarang Utara:

Tabel 1. 1 Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara

Kelurahan	Luas (ha)
Bandarharjo	33,44
Kuningan	23,09
Dadapsari	27,24
Panggung Kidul	26,00
Tanjung Mas	37,24

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021-2026

Kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang tersebar di 10 titik yaitu, Tanjung mas memiliki dua titik berada di kawasan Kebonharjo dan Tambak Lorok. Kelurahan Bandarharho memiliki kawasan permukiman kumuh sebanyak dua titik yang terbagi linier mengikuti alur jalan dan berpola terpusat dan mengelompok. Kemudian, Kelurahan Kuningan terdiri dari dua titik kawasan. Kelurahan Dadapsari terdiri dari satu titik. Kemudian Kelurahan Panggung Kidul satu titik (Aspin and Nafsi 2021).

Semenjak dilanjutnya program KOTAKU di tahun 2020, persebaran kawasan kumuh di Kota Semarang dan juga di Semarang Utara mengalami penurunan, tetapi belum sepenuhnya tuntas tertangani, dibuktikan dengan data terbaru persebaran

kawasan kumuh yang ditetapkan dengan adanya SK Walikota No. 050/275 Tahun 2021 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang, kawasan permukiman kumuh Kota Semarang ditetapkan sebesar 431,54 Ha yang tersebar di 45 kelurahan. Pada penelitian ini, ada lima kelurahan di Kecamatan Semarang Utara yang akan dianalisis yaitu kelurahan deliniasi kawasan kumuh yang terdiri dari Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, Kuningan, Dadapsari, dan Panggung Kidul. Berikut data kawasan kumuh di lima kelurahan tersebut:

Tabel 1. 2 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Lima Kelurahan Deliniasi

Lokasi	Luas (Ha)
Bandarharjo	4,26
Dadapsari	25,32
Kuningan	14,10
Panggung Kidul	5,47
Tanjung Mas	17,34

Sumber: Surat Keputusan Walikota Nomor 050/275 Kota Semarang Tahun 2021

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel bisa dilihat bahwa luasan kawasan kumuh di Kecamatan Utara mengalami penurunan dari SK tahun 2014. Namun, belum tuntas secara keseluruhan sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 0% kawasan kumuh.

Pertama, kawasan kumuh di Tanjung Mas. Kawasan kumuh di Tanjung Mas berbentuk memusat dan mengelompok di sekitar pasar dengan berbagai industri, pelabuhan, stasiun kereta api, rel kereta api, dan di sekitar permukiman yang dilewati

oleh Sungai (Aspin and Nafsi 2021). Banyaknya kawasan kumuh di Tanjung Mas diakibatkan dengan banyaknya bangunan-bangunan warga yang dahulu didirikan di lahan kosong Kebonharjo dan Tambaklorok baik secara legal dan illegal. Hingga sekarang, pembangunan ini masih intensif terjadi dan munculnya bangunan-bangunan tidak layak huni dan infrastruktur kurang memadai hingga kemudian membentuk kawasan permukiman kumuh. Perkumuhan kumuh di Tanjung Mas ini cenderung mendekati area pasar, rel kereta api, kawasan sempadan sungai dan pelabuhan (Aspin and Nafsi 2021). Masyarakat memilih tinggal di sana karena daerah tersebut adalah daerah mata pencaharian mereka. Selain itu, seperti yang sudah sempat disampaikan sebelumnya, ketersediaan lahan legal dan illegal di daerah tersebut menjadi alasan masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan pembangunan permukiman di daerah tersebut hingga menjadi padat dan kumuh (Aspin and Nafsi 2021).

Selanjutnya, wilayah kumuh Bandarharjo tersebar di dua lokasi berbeda dan membentuk pola permukiman kumuh yang terpusat dan mengelompok terhadap pasar dan industri dengan pola permukiman linear yang mengikuti jalan (Aspin and Nafsi 2021). Kedua kawasan permukiman kumuh dan infratraktur yang kurang memadai terbentuk sebagai akibat dari kurangnya perencanaan yang matang. Ada banyak tanah yang tidak terpakai, baik legal maupun ilegal, di daerah tersebut, yang menyebabkan kawasan kumuh muncul. Bangunan-bangunan yang dibangun di daerah tersebut berada dekat dengan sungai, pasar, dan fasilitas industri, sehingga memberi kesan kumuh dan penuh dengan ruang (Aspin and Nafsi 2021). Selain pola bangunan yang kurang teratur, masalah sanitasi masih menjadi persoalan di

Bandarharjo. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Satwika, Potro, and Sriyono (2021) yang mengatakan bahwa di Bandarharjo masih tinggi kasus diare akibat dari penggunaan air minum dari sumur artesis. Dampak dari masalah sanitasi memberikan efek buruk pada kesehatan masyarakat. Sehingga kesadaran dan kepedulian masyarakat akan sanitasi sangat penting. Namun, ditemukan masalah bahwa kesadaran akan pengetahuan sanitasi lingkungan masih tergolong sedang di Bandarharjo dan sikap masyarakat masih kurang baik dalam hal membuang sampah dan menjaga saluran limbah (Satwika et al. 2021)

Kemudian, Kelurahan Kuningan dengan dua area kawasan kumuh Pola pemukiman di kawasan ini memiliki karakteristik unik, yaitu terpusat dan berkelompok di sekitar zona industri dan pasar. Selain itu, pemukiman juga tersusun secara linear mengikuti aliran sungai. Menariknya, kawasan permukiman ini berkembang di luar area perumahan yang telah direncanakan sebelumnya di kelurahan tersebut, sehingga dapat diidentifikasi sebagai kawasan kumuh yang tumbuh di luar batas perencanaan awal. Kawasan kumuh ini tumbuh semakin parah karena tidak terkontrol dan kondisi bangunannya semakin padat dengan infrastruktur yang kurang memadai (Aspin and Nafsi 2021).

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kelurahan di Semarang Utara, seperti Dadapsari yang masih sering terjadi banjir karena tingkat kelerengan yang rendah yaitu <2% (Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Tahun 2022-2026). Selain itu diperparah dengan sarana prasarana yang belum difasilitasi dengan baik. Di kelurahan Dadapsari masih ada 241 KK

yang belum terlayani akses air bersih yang layak dan aman dan 5 KK yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Tahun 2022-2026). Masalah drainase lingkungan, air limbah/sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran juga masih perlu diselesaikan karena dari data peraturan walikota tersebut ditemukan masih ada beberapa daerah yang belum mendapat drainase lingkungan, terdapat 136,61ha daerah yang mengalami genangan air, kemudian beberapa KK belum terlayani sanitasi sesuai teknis yaitu sejumlah 357KK. Hal tersebut diperjelas dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahara et al., (2023) menemukan data bahwa di Kelurahan Dadapsari pelaksanaan program KOTAKU masih belum optimal dikarenakan pada pelaksanaan ditemukan beberapa kendala, yaitu pengerjaan yang seringkali tidak sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian BKM juga mengalami kesulitan mengontrol pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya (Sahara et al. 2023).

Berikutnya, kawasan Kelurahan Tanjung Mas yang masih memiliki 17,34ha kawasan kumuh. Hal ini dipengaruhi oleh faktor area Tanjung Mas yang berada di dataran rendah dan dekat dengan daerah pesisir, sehingga terjadi penurunan tanah dan sering terjadi genangan air rob (RPJMD Kota Semarang 2021-2026). Beberapa bangunan tidak mengikuti aturan dan tata bangunan yaitu sejumlah 480 unit dan 493 unit tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan, beberapa jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak dilengkapi saluran samping. Selain itu, masih ada 35KK yang tidak terlayani akses air bersih yang aman dan layak dan

253KK tidak terpenuhi kebutuhan air bersih. Masalah drainase lingkungan, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran juga masih banyak yang tidak tersedia dengan baik (Perwal Semarang No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Tahun 2022-2026). Terbaru, pada tahun 2024 ada sebanyak 400 rumah di Kelurahan Tanjung Mas yang mengajukan bantuan RTLH ke pemerintah pusat bahkan hingga ke swasta (Iman 2024). Bisa diartikan bahwa masih banyak rumah tidak layak huni yang belum bisa ditangani lewat program KOTAKU di Tanjung Mas. Selain itu, pada pelaksanaan program KOTAKU ditemukan masalah seperti ketidaksesuaian data kumuh yang masuk delineasi kumuh (Sahara et al. 2023).

Kelurahan Kuningan juga menghadapi masalah yang sama dengan kelurahan lainnya. Di kelurahan ini, masih terdapat sebanyak 130 KK yang tidak terlayani air bersih. Ketersediaan proteksi kebakaran, persampahan dan lingkungan juga belum optimal, masih ada sebanyak 14,10 ha luasan kumuh (Perwal Semarang No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Tahun 2022-2026). Dari dokumen tersebut juga ditemukan alasan masalah kumuh belum tuntas karena legitimasi pemilihan anggota BKM dan partisipasi anggota BKM masih kurang baik. Perencanaan dan pengelolaan informasi belum berjalan optimal, masih perlunya pengembangan kapasitas, kolaborasi antara BKM dan KSM serta pengelolaan keuangan dalam penanganan kawasan kumuh. Selain itu dari dokumen peraturan walikota tersebut juga diperoleh informasi bahwa sumber pendanaan yang diterima kurang dan kurang kolaborasi antar BKM/KSM, masyarakat, pemerintah dan organisasi non-

pemerintah (Perwal Semarang No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Tahun 2022-2026).

Melihat berbagai masalah tersebut, bisa dikatakan bahwa masalah kawasan dan permukiman di Kecamatan Semarang Utara belum berhasil dituntaskan. Pelaksanaan program KOTAKU belum mampu menyelesaikan masalah kawasan permukiman secara menyeluruh. Masih tersisa berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mulai dari masih adanya kawasan kumuh, berbagai fasilitas yang harus dipenuhi, sarana prasarana yang belum sesuai dengan syarat kelayakan dan pembangunan yang tidak memenuhi syarat teknis dan masalah lainnya. Ditemukan juga masalah seperti pengelolaan informasi yang masih kurang baik, legitimasi yang masih kurang tepat dalam hal memilih anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), masih kurangnya partisipasi BKM/LKM, monitoring, pengelolaan keuangan, pengembangan kapasitas SDM, kaderisasi, kolaborasi dengan KSM, kolaborasi dengan masyarakat dan non pemerintah juga masih kurang baik.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, penulis hendak melakukan penelitian untuk menganalisis lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program KOTAKU sehingga masih belum bisa mencapai target 0% kumuh dan belum tuntasnya masalah permukiman kumuh di Semarang Utara. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahannya dalam implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara yaitu:

1. Program KOTAKU belum mencapai target 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak (merujuk pada informasi di latar belakang halaman 6-7)
2. Pembangunan rumah di lahan kosong yang tidak sesuai standar kelayakan dan tidak terencana (merujuk pada informasi di latar belakang halaman 9-10).
3. Masih ditemukan beberapa KK (Kartu Keluarga) di berbagai kelurahan di Kecamatan Semarang Utara yang belum mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan sesuai standar seperti drainase lingkungan, air limbah/sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran (merujuk pada informasi di latar belakang halaman 11-13).
4. Kolaborasi dan partisipasi dalam program KOTAKU masih belum optimal baik antara BKM, LKM, Pemerintah, dan Tim Pelaksana lainnya (merujuk pada informasi di latar belakang halaman 13).
5. Masih kurangnya pengelolaan informasi, dan sumber pendanaan dan minimnya pengembangan kapasitas SDM, kaderisasi (merujuk pada informasi di latar belakang halaman 12-13).

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah komunikasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara?
2. Apakah sumber daya berpengaruh secara parsial terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara?
3. Apakah disposisi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara?
4. Apakah struktur birokrasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara?
5. Apakah dukungan masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara?
6. Apakah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh parsial komunikasi terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

2. Menganalisis pengaruh parsial sumber daya terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.
3. Menganalisis pengaruh parsial disposisi terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.
4. Menganalisis pengaruh parsial struktur birokrasi terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.
5. Menganalisis pengaruh parsial dukungan masyarakat terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.
6. Menganalisis pengaruh simultan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan dengan memberikan bukti empiris terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemerintah dalam mengatasi masalah yang ada di Indonesia, khususnya masalah kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model implementasi yang lebih spesifik dan kontekstual untuk program-program pengentasan kawasan kumuh di perkotaan yang ada di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi program pemerintah dan memperkuat kemampuan analisis kuantitatif dan penggunaan metode analisis korelasi dalam penelitian implementasi kebijakan publik.

2. Bagi Instansi Terkait

a. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi Program KOTAKU.

b. Menyediakan data dan analisis yang mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti ilmiah.

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, dengan penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran berbagai aktor terlibat dan para pembaca untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program-program yang dilaksanakan pemerintah.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan digunakan sebagai sumber referensi dan rujukan dalam menambah informasi dan memperkaya teori dalam kajian penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/ Judul/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	Novrialdi, R. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tembilaan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir. <i>Journal of Research and Development on Public Policy</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tembilaan Hilir.	Teori Implementasi Kebijakan Charles O. Jones (1996)	Untuk memperkaya sumber referensi terkait pelaksanaan program KOTAKU yang belum maksimal akibat faktor sumber daya anggaran.	Metode kualitatif	Pelaksanaan program KOTAKU sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan program KOTAKU namun masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
2.	Andreal Taqwa, & Dadang Mashur. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Babussalam Kecamatan Rambah	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Babussalam Kecamatan	Teori Model Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III (1980)	Memberikan tinjauan studi literatur yang sistematis terkait dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan program KOTAKU.	Metode kualitatif	Pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Babussalam belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor penghambat yaitu kesulitan dalam pembebasan lahan milik masyarakat karena tidak adanya sistem ganti rugi.

	Kabupaten Rokan Hulu. <i>Journal of Research and Development on Public Policy</i>	Rambah Kabupaten Rokan Hulu.				
3.	Delyus, R. N., & Dian Kurnia Anggreta, S. R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kotaku Menggunakan Gagasan G.C. Homans di Pasar Pandan Air Mati, Kota Solok <i>Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU (Kota Tanpu Kumuh) dalam mengatasi masalah kawasan permukiman kumuh di Pasar Pandan, Kota Solok.	Teori Pertukaran Sosial (George C. Homans, 1960)	Untuk memperkaya sumber referensi terkait faktor yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program KOTAKU.	Metode kualitatif deskriptif.	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa ada ruang terbuka untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU, bahkan dari mulai perencanaan, pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam pelaksanaan program dengan ikut berkontribusi tenaga dalam pembangunan proyek sehingga sebagai bentuk pertukaran sosial, masyarakat yang berpartisipasi diberikan reward.
4.	Ramandei, L., & Nawipa, S. (2023).	Studi ini berfokus pada tujuan mengidentifikasi keberhasilan, mengidentifikasi	Evaluasi Program dengan indikator-	Sebagai bahan referensi untuk mendukung argumen penggunaan faktor	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya adalah hasil program KOTAKU belum maksimal dikarenakan masih belum terlaksananya semua

	Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i>	kendala dan memberikan saran ataupun rekomendasi dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Hamadi.	indikator Permukiman Kumuh	partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi implementasi program KOTAKU		kegiatan dari program KOTAKU dilakukan, kemudian tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Hamadi.
5.	Rubianti, D. R., Wahyuningrat, & Simin. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). <i>Jurnal Ilmu Administrasi Negara</i>	Bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program KOTAKU di Sokaraja Kidul.	Teori Ripley dan Franklin (1986)	Sebagai tambahan referensi untuk	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini adalah pelaksanaan program KOTAKU di Sokaraja Kidul belum berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan dimensi aktor terlibat yaitu keterlibatan BKM dan KSM belum optimal. Kemudian pada dimensi perkembangan dan kerumitan program ditemukan masalah yaitu pada aspek prosedur

						program KOTAKU dan keberlanjutan belum berjalan dengan baik. Kebutuhan akan sumber daya menjadi penghambat karena belum mampu mengatasi masalah kumuh.
6.	Saketi L. dkk, (2020) Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga <i>Jurnal Ilmu Administrasi Negara</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh dari faktor-faktor <i>idealized policy</i> , <i>target group</i> , <i>implementing organization</i> dan <i>environmental factor</i> terhadap Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Purbalingga Kidul	Teori Implementasi dari Thomas B. Smith (1973)	Memperkaya referensi untuk melihat faktor mana yang memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap implementasi program KOTAKU	Kuantitatif Asosiatif	Hasil menunjukkan semua faktor yang dianalisis yaitu <i>idealized policy</i> , <i>target group</i> , <i>implementing organization</i> dan <i>environmental factor</i> memiliki pengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kelurahan Purbalingga Kidul baik secara parsial dan simultan. Secara simultan pengaruh yang diberikan sebesar 0.824. Kemudian secara parsial, faktor yang memiliki pengaruh paling besar adalah <i>environmental factor</i> dengan besar koefisien regresi yaitu 0,706
7.	Maulana, M. F., & Ahmady, I. (2022).	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses	Teori Implementasi Kebijakan	Referensi dalam membuktikan bahwa pelaksanaan program	Kualitatif	Hasil yang ditemukan yaitu implementasi program KOTAKU belum maksimal karena

	Analisis Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja). <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa</i>	implementasi kebijakan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Banda Aceh	Edward III (1980)	KOTAKU di daerah lain juga masih belum optimal karena dipengaruhi faktor yang sama yang akan dianalisis dalam penelitian ini.		dipengaruhi oleh faktor sumber daya, komunikasi, dan disposisi belum optimal. Ketersediaan anggaran kurang memadai dan keseriusan pelaksana yang kurang dalam menjalankan program KOTAKU.
8.	Ramadhan, F. M., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2022). Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Gedanganak. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>	Bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi program KOTAKU di Gedanganak.	Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980)	Untuk memperkaya sumber referensi terkait faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program KOTAKU.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program KOTAKU di Gedanganak ditemukan faktor penghambat yaitu masih kurangnya sosialisasi, pendanaan yang terhambat, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Sementara, faktor yang mendukung adalah komunikasi,

						ketersediaan sumber daya dan juga keterlibatan masyarakat.
9.	Widodo, A., & Ub, A. R. (2024). <i>Effectiveness of the KOTAKU (City Without Slums) Program in Sidoarjo Regency</i> <i>Journal of Geosciences and Environmental Studies</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas dari program KOTAKU yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi masalah permukiman kumuh dan untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor penghambat efektivitas program KOTAKU di Kab. Sidoarjo.	Teori Efektivitas dari Siagian (2008)	Untuk memperkaya sumber referensi dalam menganalisis faktor mana yang sebenarnya mengakibatkan kegagalan implementasi program KOTAKU di daerah lain yang sekiranya bisa jadi bahan tambahan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini.	Metode deskriptif kualitatif	Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Sidoarjo ditemukan beberapa kendala yaitu terkait penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial dan keterbatasan jumlah fasilitator. Secara keseluruhan, Program KOTAKU di Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, meskipun beberapa kendala di atas harus tetap diperbaiki dan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan membutuhkan perencanaan matang, dukungan sumber daya yang memadai, serta kemampuan adaptasi menghadapi berbagai hambatan.

10.	Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. <i>Journal of Civic Education</i>	Bertujuan untuk menganalisis implementasi program KOTAKU di Kenagarian Piobang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980)	Untuk memperkaya studi literatur terutama dalam menambah informasi dalam menganalisis faktor penyebab tidak tercapainya target program KOTAKU.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan program KOTAKU wilayah kumuh menurun, tetapi ada beberapa aspek yang masih kurang optimal, seperti sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami maksud dan tujuan program KOTAKU. Selain itu, sumber daya terutama pada aspek partisipasi masyarakat masih kurang begitu juga fasilitas dan anggaran yang belum mencukupi.
-----	--	---	---	---	------------------------------	--

11.	Sedubun, S. N., Purwanti, N., & Kadir, M. A. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Kawasan Kumuh Perkotaan Di Distrik Sorong Timur Kota Sorong. <i>Papua Journal of Sociology</i>	Tujuannya untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU dalam menangani masalah kawasan kumuh di Distrik Sorong	Partisipasi Masyarakat Adisasmita (2006)	Untuk menambah referensi dalam menganalisis faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi program KOTAKU diluar faktor dari teori Edward III	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi program KOTAKU di Distrik Sorong masih kurang aktif, hanya sebagian warga yang ikut rapat dan sosialisasi yang diadakan pemerintah setempat.
12.	Kiki Endah, Budiman Rusli, Dede Sri Kartini, & Sawitri Budi Utami. (2023). The Network of Actors, Functions, and Structures: a Study on Slum Management in Ciamis District.	Studi ini bertujuan untuk melihat jaringan kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan permukiman kumuh.	<i>The Policy Network Approach Put Out By Waarden</i> (1992)	Memberikan gambaran tentang evaluasi partisipatif masyarakat, karena di program KOTAKU salah satu aspek penting dalam pelaksanaannya adalah keterlibatan masyarakat.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks jejaring kebijakan, pemangku kepentingan lain seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, media massa, dan sektor swasta perlu dilibatkan untuk memberikan masukan dalam merancang kebijakan penanganan permukiman kumuh. Studi ini memperkuat bahwa

	<i>Journal of Namibian Studies: History Politics Culture</i>					permukiman kumuh harus diselesaikan dengan kerja sama antar aktor, penguatan fungsi kelembagaan, dan struktur yang terkoordinasi.
13.	Suryani, R., & Sally Marisa Sihombing. (2023). <i>Implementation Of The City Without Slums (KOTAKU) Program In Johor Village Building, Medan Johor District.</i> <i>Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics</i>	Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Program KOTAKU sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kecamatan Medan Johor	Teori model implementasi Van Horn Van Meter (1975)	Sebagai sumber referensi dalam menilai implementasi program KOTAKU di daerah lain apakah sudah berhasil atau sama dengan kondisi di Kecamatan Semarang Utara.	Deskriptif Kualitatif	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KOTAKU di Medan Johor belum sepenuhnya efektif dan efisien karena masih ada perumahan dari masyarakat yang belum tertangani dengan program KOTAKU.
14.	Sulila, Ismet (2021). <i>Journal of Asian Finance, Economics and Business</i> <i>The Influence of Structure, Resources,</i>	Tujuan dari riset ini adalah mengukur pengaruh dari struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan	<i>Theory Implementation from George Edward III (1980)</i>	Sebagai rujukan tambahan dalam menentukan faktor-faktor yang dianalisis dalam studi kasus penelitian ini.	Kuantitatif eksplanatori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keempat faktor (struktur birokrasi, disposisi, komunikasi sumber daya) memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara parsial (individual) maupun simultan (bersama-sama),

	<i>Disposition and Communication on Small- and Medium-Sized Enterprises' Empowerment Policy Implementation in Indonesia</i>	pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia.				terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM.
15.	Rizky Rahmani, M., Arifin, J., & Rijali, S. (2020). Implimentasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. <i>Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis</i>	Untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KOTAKU di Kelurahan Agung, yang terdiri dari sumber-sumber kebijakan, komunikasi, sikap pelaksana, kemampuan organisasi, struktur, dan sumber daya	Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun	Memperkaya studi literatur terkait analisis faktor yang mempengaruhi implementasi dengan metode kuantitatif.	Survei/Angket	Temuan dalam penelitian menunjukkan faktor penghambat implementasi program KOTAKU di Kelurahan Agung adalah kemampuan organisasi.

Berdasarkan studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan utama yang ditemukan memiliki pengaruh dalam implementasi program KOTAKU dalam menangani masalah kumuh di berbagai daerah yaitu:

Komunikasi merupakan salah satu faktor fundamental dalam implementasi program KOTAKU. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang tidak optimal dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya, penelitian Ramadhan, dkk., (2022) di Kelurahan Gedanganak menemukan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat implementasi program. Hal serupa juga terungkap dalam penelitian Handika and Yusran (2020) di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mencatat bahwa sosialisasi belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan program KOTAKU.

Selanjutnya, sumber daya menjadi aspek krusial lainnya dalam implementasi program. Hampir seluruh penelitian mengidentifikasi keterbatasan sumber daya sebagai kendala utama. (Novrialdi 2024) dalam penelitiannya di Kelurahan Tembilahan Hilir menemukan bahwa pelaksanaan program KOTAKU belum maksimal akibat keterbatasan anggaran. Serupa dengan Maulana and Ahmady (2022) di Kota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa ketersediaan anggaran yang kurang memadai secara signifikan memengaruhi kualitas implementasi program.

Disposisi atau sikap para pelaksana program juga memainkan peran penting. Maulana and Ahmady (2022) menekankan bahwa keseriusan pelaksana dalam menjalankan program KOTAKU sangat menentukan keberhasilannya. Kurangnya

komitmen dan motivasi dari para implementor dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Struktur birokrasi turut memberikan kontribusi signifikan dalam keberhasilan implementasi. Studi yang dilakukan Suryani and Sally Marisa Sihombing (2023) di Kecamatan Medan Johor menunjukkan bahwa belum seluruh perumahan masyarakat tertangani, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam struktur dan mekanisme pelaksanaan program.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci terakhir yang patut diperhatikan. Beberapa penelitian, seperti Sedibun, Purwanti, and Kadir (2023) di Distrik Sorong, mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah, dengan hanya sebagian kecil warga yang menghadiri rapat dan sosialisasi. Namun, penelitian Delyus and Dian Kurnia Anggreta (2023) di Pasar Pandan menunjukkan potensi positif partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan aktif dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, keberhasilan Program KOTAKU membutuhkan pendekatan komprehensif yang memperhatikan kelima faktor tersebut: komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi positif dari pelaksana, struktur birokrasi yang solid, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Widodo and Ub (2024) keberhasilan program pembangunan membutuhkan perencanaan matang, dukungan sumber daya yang memadai, serta kemampuan adaptasi menghadapi berbagai hambatan.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian terdahulu terkait implementasi KOTAKU relevan untuk penelitian yang akan dilakukan dengan

judul "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara". Penelitian yang akan dilakukan di Semarang Utara dapat mengambil pembelajaran dan juga informasi terkait berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Program KOTAKU sehingga ada daerah yang sudah berhasil dan ada juga yang masih gagal dan belum optimal dalam melaksanakan program KOTAKU.

Pada penelitian ini, maka akan dilakukan analisis yang lebih mendalam, berangkat dari berbagai permasalahan yang sudah diuraikan di latar belakang dan juga temuan-temuan penelitian terdahulu, untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sebenarnya pengaruh faktor-faktor yang ditemukan dalam implementasi program KOTAKU secara khusus di Kecamatan Semarang Utara. Dalam hal ini, faktor yang akan dianalisis pengaruhnya dengan implementasi program KOTAKU ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Pada penelitian ini, yang menjadi pembeda adalah penggunaan metode-nya dimana jika pada penelitian sebelumnya kecenderungan menggunakan metode kualitatif dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Sementara penelitian ini, akan dilakukan analisis dan pengukuran data statistik untuk bisa menilai faktor-faktor mana yang memiliki pengaruh dan signifikan dalam memengaruhi implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Metode dengan kasus dan lokasi yang sama dalam penelitian ini belum ada yang melakukan sebelumnya, sehingga harapannya dengan penelitian ini dapat

menemukan dan mengukur bagaimana pengaruh yang terjadi antara faktor-faktor yang dianalisis terhadap implementasi program KOTAKU. Selain itu, dalam penelitian ini ada penambahan faktor yang akan dianalisis selain dari teori Edward III yaitu faktor dukungan masyarakat yang menjadi variabel (X5) dalam penelitian ini. Lima faktor yang akan diukur pengaruhnya terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat. Harapannya, hasil penelitian ini memberikan hasil yang konkret dan bisa bermanfaat pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan penanganan kawasan kumuh ataupun kebijakan lainnya yang akan dilakukan pemerintah.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik didefinisikan sebagai proses dalam mengorganisir sumber daya dan aparat publik untuk menformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik Chandler & Plano dalam Keban, (2004). Selain itu, kedua tokoh tersebut mengatakan administrasi publik tidak hanya sekadar ilmu, tetapi juga seni dalam mengatur berbagai individu agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Administrasi publik merupakan bidang kajian yang difokuskan pada upaya mengatasi persoalan-persoalan sosial melalui pengelolaan dan penggunaan sumber daya secara maksimal, dengan mengutamakan pencapaian hasil yang optimal dan penggunaan sarana yang tepat guna (Chandler & Plano dalam Keban, 2004).

Menurut perspektif Keban, konsep Administrasi Publik menggambarkan peran pemerintah sebagai institusi sentral yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur masyarakat. Pemerintah dipandang sebagai entitas yang memiliki hak

istimewa untuk menentukan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang dianggap sesuai dengan kepentingan publik, dengan mengasumsikan bahwa masyarakat berada pada posisi yang lemah dan kurang berdaya (Keban 2004)

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan proses dalam penyelesaian masalah, melainkan juga pemanfaatan sumber daya dengan efektif, efisien sehingga mampu mencapai tujuan dari suatu organisasi yang mana pemerintah memegang peranan penting dalam mengorganisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi

Perkembangan administrasi sebagai cabang keilmuan telah mengalami transformasi pemikiran yang ditandai dengan pergeseran paradigma. Setiap perubahan paradigma menggambarkan evolusi dalam pendekatan, konsep teoritis, metodologi, serta nilai fundamental yang mendasarinya (Ikeanyibe et al., 2017). Berikut paradigma administrasi publik (Ikeanyibe et al., 2017):

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini dicirikan oleh upaya memisahkan secara tegas fungsi politisi dan fungsi administratif pemerintahan. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja kelembagaan dengan mendorong efisiensi dan efektivitas. Woodrow Wilson menjadi tokoh sentral yang mengembangkan gagasan ini, dengan menekankan empat prinsip utama: (1) Mempertegas batas antara wilayah politik dan administrasi (2) Melakukan kajian komparatif antarorganisasi (3) Mengadopsi

praktik bisnis dalam operasional pemerintahan (4) Mengoptimalkan pelayanan publik melalui manajemen sumber daya manusia yang profesional

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma kedua adalah paradigma prinsip-prinsip Administrasi. Diyakini bahwa dengan adanya prinsip-prinsip ilmiah tertentu dari administrasi, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari pemerintah. Gullick & Urwick (1973) mengidentifikasi ada tujuh prinsip administrasi yaitu dikenal dengan istilah POSDCORB yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Dengan prinsip-prinsip inilah diyakini dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi.

3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950– 1970)

Masa pada paradigma ini ditandai dengan saling klaim antar ilmuwan politik dan manajemen terhadap disiplin administrasi publik. Dikotomi antara politik dan administrasi mulai dipertanyakan, dengan kesadaran bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Politik diperluas maknanya dari sekadar aktivitas partisan menjadi proses pembuatan kebijakan publik yang komprehensif (Basheka dalam Ikeanyibe et al., (2017). Pendekatan ini terus menekankan perspektif birokrasi, namun berujung pada birokratisasi berlebihan dan penyebaran administrasi publik ke hampir seluruh aspek pemerintahan.

4. Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Paradigma ini sebagai upaya memaknai administrasi publik murni dari sudut pandang manajerial. Periode ini hampir bersamaan dengan fase

sebelumnya, di mana dua disiplin ilmu saling memperebutkan "jiwa" administrasi publik. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Henry (1975), disiplin tersebut harus bertahan dari serangan gencar ini karena paradigma berikutnya adalah Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik atau Administrasi Publik sebagai Manajemen Publik (dari 1970 hingga 1990).

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Pada tahap ini, terdapat upaya sistematis untuk membangun kembali administrasi sebagai bidang studi independen. Fokus birokrasi yang sebelumnya bersifat hierarkis mulai dialihkan ke mekanisme pasar dan praktik organisasi sektor swasta. Dengan begitu, telah terjadi transformasi signifikan dari model administrasi publik tradisional menuju model New Public Management (NPM). Meskipun berbeda dengan tahapan perkembangan administrasi publik yang dipaparkan Henry (1975), Peters (2003) menegaskan bahwa ini merupakan perubahan paradigma yang sesungguhnya. Peters menguraikan bahwa lima asumsi model tradisional yang dipaparkan Walsh dan Stewart (1992) sesungguhnya merupakan kumpulan pemikiran berharga yang menggambarkan mekanisme pemerintahan dalam menjalankan fungsi publiknya sebelum era reformasi. Konsekuensinya, pergeseran paradigma kritis tidak berlangsung dalam tahapan terperinci sebagaimana diidentifikasi Henry (1975), melainkan berkembang dalam tiga aliran utama, yaitu:

1. Paradigma Konvensional/Tradisional
2. Paradigma New Public Management (NPM)
3. Paradigma Tata Kelola

Perubahan ini menandakan evolusi fundamental dalam memahami dan mengimplementasikan praktik administrasi sektor publik.

Teori NPM sama seperti pendekatan atau paradigma sebelumnya, muncul untuk menghadapi masalah yang sama yaitu inefisiensi dalam sistem administrasi. Ini berawal dari perpaduan teori ekonomi dan teknik manajemen sektor swasta. Ajarannya bertumpu pada penarikan diri negara. Asumsi lain dari administrasi publik tradisional seperti klaim birokrasi Weberian sebagai struktur yang paling tepat untuk administrasi yang efektif semuanya ditentang oleh paradigma ini. Secara keseluruhan, paradigma pemerintahan telah menjadi era tersendiri atau lebih tepatnya orientasi dalam praktik administrasi publik dan para sarjana telah dengan jelas memberikan penjelasan intelektual mengapa paradigma ini harus menjadi paradigma pilihan dalam teori dan praktik administrasi publik.

6. Tata Kelola/*Governance* (1990-Sekarang)

Paradigma ini merupakan pertanda proses pemerintahan yang menuju ke arah modern. *Governance* atau tata kelola pemimpin politik menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan warga negaranya. Istilah tata kelola digunakan untuk menggambarkan beberapa proses mendasar pemerintahan modern yang berbeda dari cara “pemerintahan” beroperasi secara tradisional. Ini terdiri dari proses politik yang luas dimana partisipasi warga negara dan kelompok dalam kebijakan dan program pemerintah sangat penting. Berbeda dengan NPM, orientasi tata kelola pemerintahan tidak hanya mengandalkan efektivitas sektor swasta dan manajerialisme bisnis, melainkan

berfokus pada peran aktor dan jaringan non-pemerintah dalam memproduksi barang dan jasa publik. Hal ini berupaya untuk mengkonfigurasi ulang peran sektor publik melalui partisipasi warga dan tata kelola jaringan.

Berdasarkan berbagai penjelasan paradigma tersebut, maka dalam penelitian ini akan menggunakan paradigma *governance* dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan peneliti memahami bahwa dalam hal mencapai suatu target dan kesejahteraan bersama lewat kebijakan ataupun program dibutuhkan berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk ikut terlibat bersama dengan kelompok kebijakan lainnya. Demikian halnya dalam program KOTAKU yang diterapkan secara sistematis mulai dari pusat hingga ke daerah dan memberdayakan masyarakat untuk bisa ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program dari pemerintah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu mengentaskan kawasan kumuh.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) merujuk pada alat peraturan yang digunakan mengatur dan mengikat semua masyarakat di suatu negara (Nugroho, 2009). Pemerintah menangani berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun melalui instansi pemerintah dengan adanya produk kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik ini dilakukan oleh administrasi negara yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah (Wahyuni, 2022). Hal ini selaras dengan definisi yang diberikan oleh James Anderson dalam bukunya "*Public Policy Making*" (2010: 42) yang menyatakan bahwa Kumpulan

tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang terkait dengan masalah atau persoalan yang diperhatikan disebut sebagai kebijakan publik.

Dalam buku "Pengantar Analisis Kebijakan Publik", William N. Dunn (1994) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan terencana yang dihasilkan oleh institusi pemerintahan. Ruang lingkup kebijakan ini mencakup berbagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pertahanan nasional, keamanan, energi, layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, penanggulangan kriminalitas, dan pengembangan perkotaan. Harold Laswell dan Abraham Kaplan melengkapi definisi tersebut dengan menekankan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah rencana strategis yang disusun untuk mewujudkan tujuan spesifik, menegakkan nilai-nilai tertentu, dan mengimplementasikan praktik yang dianggap tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nugroho 2009)

Menurut Dunn (dalam Keban, 2019: 80), terdapat beberapa tahapan penting dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy assessment*).

1) Agenda Kebijakan

Tahap agenda kebijakan merupakan tahap yang dilakukan untuk menetapkan masalah yang harus ditangani. Dalam penentuan masalah yang akan diselesaikan digunakan sebuah prosedur yang disebut dengan *problem structuring*.

2) Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, para analis kebijakan akan melakukan identifikasi apa saja kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang sudah ditetapkan dalam agenda setting. Setiap kemungkinan kebijakan akan dilakukan analisis konsekuensi yang mungkin terjadi jika diterapkan.

3) Adopsi Kebijakan

Setelah dilakukan formulasi kebijakan, maka akan dipilih satu kebijakan dan direkomendasikan untuk diterapkan. Pilihan kebijakan akan diadopsi menjadi kebijakan dengan dukungan administrator dan legislatif tahap inilah yang disebut adopsi kebijakan.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap di mana unit-unit administrasi tertentu akan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia. Proses implementasi disertai juga dengan adanya pengawasan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan berjalan dengan baik.

5) Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan merupakan tahapan untuk menilai pelaksanaan kebijakan/implementasi kebijakan. Penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang diimplementasikan bisa mencapai target yang diharapkan atau tidak.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah upaya terstruktur yang disusun oleh lembaga/instansi tertentu untuk

menangani persoalan/masalah yang dihadapi oleh masyarakat di suatu negara yang dilakukan melalui berbagai tahapan yang sistematis. Kebijakan publik ini bisa berupa program, aturan dan aktivitas-aktivitas yang mendapat dukungan administratif dan legislatif.

1.6.5 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2009) mplementasi kebijakan adalah cara suatu kebijakan dapat mencapai tujuan atau target. Pengimplementasian kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui program atau dengan membuat kebijakan yang merupakan hasil atau turunan dari kebijakan publik, seperti undang-undang. Oleh karena itu, penerapan kebijakan dianggap sebagai proses yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Model-model implementasi kebijakan (Nugroho, 2009):

1. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalm Suparno (2017:32), implementasi berkorelasi dengan pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik. Disebutkan juga dalam model ini, ada empat faktor yang dapat memengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
- b. Karakteristik agen pelaksana atau implementator
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d. Kecenderungan (disposisi) implementor

Van Meter dan Horn menekankan pada pentingnya implementor (agen pelaksana) sehingga bentuk implementasinya yaitu top down. Komunikasi yang digunakan implementor penting diperhatikan karena memengaruhi respons masyarakat. Implementor memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan standar dan tujuan dari kebijakan yang hendak diimplementasikan. Keberhasilan dan kecenderungan implementor akan memengaruhi kinerja kebijakan publik yang akhirnya diambil kesimpulan berhasil atau gagal dalam implementasinya.

2. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2009) ada tiga variabel dalam implementasi kebijakan yang di klasifikasikan dengan karakteristik dan indikator sebagai berikut:

- a. Variabel Independen yaitu berkaitan dengan tingkat kemudahan atau kompleksitas pengendalian suatu permasalahan. Indikator dari variabel (1) tingkat kesulitan teknis penyelesaian masalah, (2) eragaman objek yang akan ditangani, (3) intensitas perubahan yang diharapkan terjadi
- b. Variabel intervening yaitu menggambarkan kapasitas suatu kebijakan dalam mengatur dan menstrukturisasi proses implementasi.dengan indikator yaitu (1) kejelasan dan konsistensi tujuan yang hendak dicapai, (2) kesesuaian penerapan teori kausalitas, (3) akurasi alokasi sumber daya yang tersedia, (4) integrasi hierarkis antarlembagaan, (5) mekanisme pengambilan keputusan pada lembaga pelaksana, (6) proses perekrutan pejabat implementasi (7) aksesibilitas formal terhadap pihak

eksternal (8) kemampuan menstrukturkan proses implementasi secara komprehensif,

- a. Variabel dependen Variabel ini fokus pada tahapan implementasi kebijakan dengan lima indikator utama yaitu ma) keluaran kebijakan lembaga pelaksana b) kesediaan kelompok sasaran untuk mematuhi keluaran kebijakan c) dampak aktual dari keluaran kebijakan d) dampak yang dirasakan dari keluaran kebijakan dan e) perubahan mendasar terhadap undang-undang. Pada intinya model implementasi kebijakan publik Mazmanian dan Sabatier berfokus pada fenomena yang memiliki pengaruh pada implementasi kebijakan publik.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik Grindle

Grindle dalam Suparno (2017: 29) menyatakan bahwa pemecahan suatu masalah bergantung pada kualitas dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Implementasi kebijakan adalah upaya yang harus dilakukan agar kebijakan mencapai tujuannya secara optimal. Tujuan yang telah tertuang di dalam kebijakan publik diimplementasikan melalui program aksi dan berbagai kegiatan melalui indikator keberhasilan program atau kegiatan. Keberhasilan suatu kebijakan dicapai apabila mendapatkan hasil yang diharapkan atau direncanakan melalui dua hal yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

4. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III

Edward III dalam Tahir (2015) menyatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu *communication* (komunikasi),

resources (sumber daya) *disposition or attitude* (sikap pelaksana), *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

a. Komunikasi

Sesuai dengan pendapat Edward III, komunikasi memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan (Effendy and Onong Uchjana 2018). Pelaku kebijakan membutuhkan akses informasi yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan implementasi. Pemahaman mendalam tentang substansi dan konteks kebijakan menjadi prasyarat utama bagi mereka dalam merancang strategi dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Edward III dalam Widodo, 2010).

Edward III dalam Widodo (2010) menyampaikan bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi kebijakan yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dan peraturan tersampaikan dengan jelas dan akurat.

1. Dimensi Transmisi (*Transmission*)

Dimensi transmisi merupakan salah satu dimensi komunikasi yang merujuk pada cara disampaikannya informasi kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan (Edward III dalam Widodo, 2010)

2. Dimensi Kejelasan (*Clarity*)

Dimensi kejelasan dalam komunikasi merupakan informasi berkaitan dengan kebijakan disampaikan secara jelas, sehingga para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak berkepentingan mengetahui maksud , tujuan, sasaran dan substansi dari kebijakan yang diimplementasikan. Kejelasan informasi ini sangat penting agar setiap stakeholder memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan dan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan (Edward III dalam Widodo, 2010)

3. Dimensi Konsistensi

Dimensi konsistensi mensyaratkan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan harus memiliki kejelasan dan ketegasan tidak berubah-ubah dan simpang siur, memastikan informasi sampai kepada pelaksana tanpa perubahan atau interpretasi yang dapat menimbulkan kerancuan bagi berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut (Edward III dalam Widodo, 2010)

b. Sumber daya

Sumber daya mempunyai memiliki pengaruh dan peranan dalam penerapan kebijakan pemerintah. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya untuk menerapkan kebijakan publik akan berdampak pada organisasi atau lembaga yang melaksanakannya. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwasanya sumber daya dalam implementasi kebijakan terdiri dari manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi kebijakan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia memainkan peran fundamental. Hal ini mencakup tidak hanya jumlah staf yang memadai, tetapi juga tingkat kapasitas dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan. Menurut perspektif Edward III, sebagaimana dikutip Widodo (2010) sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam proses implementasi kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan sangat jelas dan instruksi telah disampaikan secara akurat, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kapasitas dan kemampuan para pelaksana. Dengan kata lain, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, para implementator akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas-tugas kebijakan secara efektif. Hal ini menggarisbawahi bahwa ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.

2. Sumber Daya Anggaran

Edward III sebagaimana dikutip dari Widodo (2010) menekankan pentingnya sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan pendanaan memiliki dampak multidimensi yang signifikan terhadap keberhasilan suatu program. Pertama, minimnya anggaran langsung memengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan. Selanjutnya, hal ini menciptakan tantangan dalam pemberian insentif yang memadai kepada para pelaksana kebijakan, yang berpotensi menurunkan motivasi dan kinerja

mereka. Lebih lanjut, keterbatasan finansial tidak hanya menghalangi pelaksanaan optimal program, tetapi juga dapat menurunkan semangat dan sikap (disposisi) para implementator. Dengan demikian, Edward III menegaskan bahwa sumber daya keuangan merupakan faktor krusial yang secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

3. Sumber Daya Peralatan

Edward III, dalam perspektifnya yang dikutip Widodo (2010), menekankan signifikansi sumber daya peralatan dan fasilitas fisik dalam proses implementasi kebijakan. Keberadaan infrastruktur dan perlengkapan menjadi komponen kritis yang tidak dapat diabaikan. Meskipun sebuah tim memiliki staf yang kompeten, memahami tugas dengan baik, dan memiliki kewenangan yang jelas, namun tanpa dukungan fasilitas yang memadai, implementasi kebijakan akan menghadapi kendala serius. Hal ini mencakup kebutuhan akan bangunan, peralatan, perlengkapan, dan bahkan ruang terbuka yang diperlukan.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya peralatan juga penting dalam implementasi kebijakan, karena selain ketersediaan staf yang cukup dan pemahaman staf terkait kebijakan, dibutuhkan juga ketersediaan fasilitas seperti bangunan, tanah, persediaan peralatan dan lainnya.

4. Sumber Daya Kewenangan

Kemampuan suatu organisasi ataupun lembaga dalam melaksanakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki dalam membuat keputusan. Dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksana program atau

kebijakan harus diberikan wewenang yang cukup agar mampu menjalankan kebijakan (Edward III dalam Widodo, 2010)

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposi yang dimaksud dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Misroji (2014) adalah sikap para pelaksana kebijakan yang berperan dalam mencapai yang diharapkan dari diimplementasikannya suatu kebijakan/program. Sikap ini meliputi, kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh (Edward III dalam Widodo, 2010). Sikap tersebut harus dimiliki pelaksana kebijakan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan teori dari Edward III tersebut, bisa disimpulkan bahwa disposisi ataupun erat kaitannya dengan sikap para pelaksana terhadap implementasi kebijakan. Sehingga dengan demikian, suatu kebijakan publik yang dilaksanakan tanpa adanya sikap pelaksana yang mendukung maka implementasi tidak akan efektif.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi memiliki peranan kritis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya dan pemahaman pelaksana telah memadai, ketidakefektifan struktur birokrasi dapat menghambat proses implementasi (Widodo, 2010). Edward III menggarisbawahi bahwa efektivitas implementasi kebijakan dapat tersendat akibat ketidakefisienan struktur birokrasi. Kompleksitas birokrasi tidak sekadar soal hierarki, melainkan mencakup dinamika hubungan antarunit, mekanisme pendelegasian wewenang, dan pola interaksi organisasional yang rumit.

Dua komponen utama dalam struktur birokrasi yang perlu diperhatikan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan mekanisme internal untuk menjamin konsistensi dan keseragaman dalam sistem kerja yang kompleks. Ketiadaan atau ketidaksesuaian SOP dapat menghalangi penerapan kebijakan baru yang memerlukan pendekatan atau sumber daya berbeda (Edward III dalam Winarno, 2005). Kemudian, fragmentasi sendiri merujuk pada pembagian tanggung jawab di antara berbagai unit organisasi. Struktur yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan kendala komunikasi, di mana instruksi dapat mengalami distorsi karena tersebar di berbagai bagian. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab terhadap badan atau unit. Jika struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar, red.) dapat menyebabkan kurangnya komunikasi karena ada banyak kemungkinan instruksi terdistorsi (Edward III dalam Widodo, 2010).

5. Model Implementasi Kebijakan Publik Jan Merse

Menurut Jan Merse dalam Tahir (2015), faktor yang memengaruhi implementasi yaitu terdiri dari:

a. Informasi

Informasi sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan karena kekurangan informasi dapat memengaruhi kebijakan itu sendiri. Informasi yang dimaksud disini adalah adanya keterbukaan dalam berkomunikasi pada proses implementasi kebijakan.

b. Isi Kebijakan

Isi kebijakan berpengaruh pada seberapa besar manfaat dan sasaran yang dapat dirasakan dari kebijakan, yang sangat penting untuk pelaksanaannya.

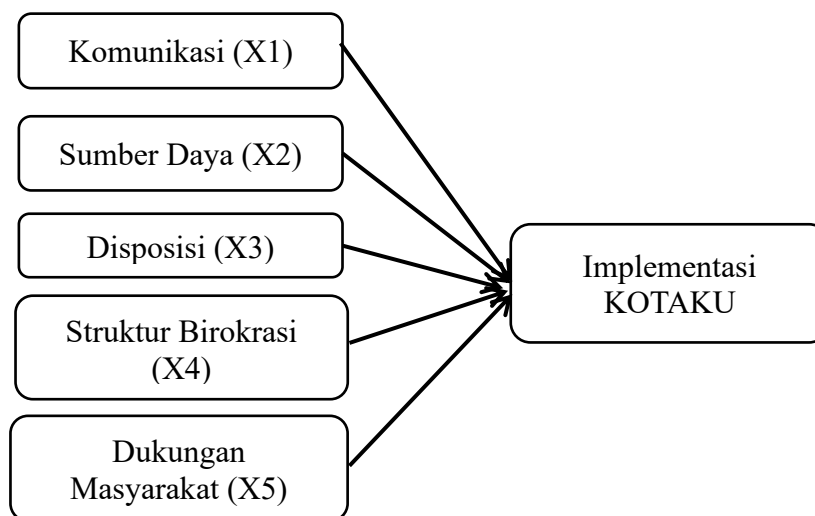
c. Dukungan Masyarakat (Fisik dan Non-Fisik)

Dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Dalam implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bagian dari stakeholder dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan dan membuat kebijakan pemerintah karena akan memengaruhi kehidupan mereka sendiri mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Bryant dan White dalam Ndraha (2007) membedakan partisipasi masyarakat menjadi dua jenis yaitu: partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi horizontal terjadi antara warga negara atau kelompok masyarakat, sedangkan partisipasi vertikal berlangsung dari bawahan ke atasan, atau antara masyarakat dengan pemerintah. Partisipasi vertikal dapat dilihat dari dua kegiatan utama: politik dan administratif. Kegiatan politik mencakup pemberian suara dan kampanye, sementara kegiatan administratif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya, ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam program yang diinisiasi oleh pihak lain, dengan posisi masyarakat berada di bawah pemerintah.

d. Pembagian Potensi

Dalam implementasi kebijakan, pembagian potensi membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Karena itu, koordinasi antar organisasi sangat penting untuk keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan teri di atas, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semrang Utara, maka teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edward III dan Jan Merse dengan menganalisis empat faktor dari Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan satu faktor dari Jan Merse yaitu Komunikasi. Adapun pertimbangan analisis yang dilakukan adalah berdasarkan fenomena yang diamati, pelaksanaan program KOTAKU di daerah lainnya kurang optimal selain karena dipengaruhi oleh faktor dari teori Edward III, dipengaruhi juga oleh kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, berikut kerangka model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. 2 Konstruk Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

1.6.6 Kawasan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh mendefinisikan kawasan permukiman kumuh sebagai: wilayah atau area hunian yang tidak layak dihuni disebabkan oleh kondisi lingkungan, infrastruktur, dan bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai kawasan permukiman kumuh karena area hunian yang tidak memenuhi syarat kelayakan huni mulai dari bangunanya yang tidak teratur, kepadatannya yang tinggi, kualitas dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar. Sehingga lingkungan yang seperti ini dinilai tidak layak untuk ditempati berdasarkan kriteria teknis dan sosial yang berlaku.

1.6.7 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program Kotaku adalah inisiatif nasional yang dimulai pada tahun 2015 di 269 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Tujuan KOTAKU adalah untuk mengurangi luas permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 ha dengan perawatan dan peningkatan kualitas 38.431 ha wilayah kumuh di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, perusahaan swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan program adalah untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh Petunjuk teknis yang dibuat oleh PUPR digunakan dalam pelaksanaan program KOTAKU (Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh)

Pelaksanaan program KOTAKU diharapkan mampu meningkatkan fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan publik di daerah kumuh perkotaan sehingga bisa mewujudkan lingkungan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Empat tahap utama persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan—digunakan dalam pelaksanaan Program Kotaku. Pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat setempat harus aktif berpartisipasi dalam program ini. Ini termasuk pelatihan, sosialisasi, pemetaan wilayah kumuh, penyusunan rencana, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, pelaksanaan infrastruktur, dan perawatan dan pemeliharaan lingkungan setelah program selesai. Berikut penjelasan lebih lengkap terkait tahapan dari program KOTAKU yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan pemetaan wilayah kumuh berdasarkan kategori kumuh untuk kemudian menjadi data baseline yang dilakukan oleh TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif). Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari adanya Program Kotaku sehingga muncul kepedulian masyarakat dengan suka rela memberikan waktu dan tenaganya untuk berpartisipasi langsung dalam tahapan-tahapan Program Kotaku.

2. Tahap Perencanaan

Pada fase ini, RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dibuat berdasarkan data baseline atau hasil pemetaan. Dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat, yang dibentuk oleh seluruh

masyarakat. Kelompok ini ditugaskan untuk mengatur masyarakat selama Program Kotaku.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari proses pelaksanaan Program Kotaku sesuai dengan rencana yang telah disusun, yaitu RPLP. RPLP berisi susunan kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai acuan yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan Program Kotaku. Kegiatan ini dilakukan bersama secara berkolaborasi baik pelaksana dari pemerintah dan masyarakat setempat dengan melibatkan komunitas/organisasi masyarakat ikut dalam pelaksanaan program.

4. Tahap Keberlanjutan

Ini merupakan tahap terakhir dari implementasi Program Kotaku yang dilakukan setelah tahapan pelaksana, yaitu pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sudah selesai dilakukan. Inti dari tahap ini adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan sekitar oleh masyarakat sehingga hasil dari Program Kotaku dapat bertahan lama.

1.6.8 Hubungan Komunikasi (X1) dan Implementasi

Komunikasi menjadi aspek penting dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk saling berbagi informasi. Dalam hal kebijakan publik, komunikasi sangat penting karena komunikasi menjadi salah satu aspek yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan/kebijakan ataupun program dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Seneru 2024). Melalui komunikasi yang efektif,

berbagai informasi akan tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada anggota sehingga bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik.

Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan implementasi, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ramadhan et al., (2022) dalam penelitiannya di Kelurahan Gedanganak mengidentifikasi bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu hambatan kritis dalam mengimplementasikan program KOTAKU. Temuan serupa dikemukakan oleh Handika & Yusran (2020) yang menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memahami maksud dan tujuan program. Sehingga dapat disimpulkan komunikasi memiliki hubungan yang krusial dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Sehingga bisa disimpulkan, ketika komunikasi yang terlaksana dalam implementasi suatu kebijakan ataupun program kurang baik, maka implementasi bisa terganggu dan tidak berjalan dengan optimal.

1.6.9 Hubungan Sumber Daya (X2) dan Implementasi

Sumber daya merupakan komponen kritis dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut pandangan teoritis Edwards III (1980), sumber daya mencakup empat elemen utama: sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia menjadi faktor fundamental dalam menggerakkan mekanisme implementasi. Kualitas, kompetensi, dan kuantitas personel yang terlibat secara langsung memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Siagian (2008) menekankan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak sekadar merujuk pada jumlah, melainkan kemampuan adaptasi dan problem solving dalam konteks implementasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan signifikansi sumber daya dalam menentukan keberhasilan program. Novrialdi (2024) dalam studinya mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran secara signifikan memengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Temuan serupa dikemukakan oleh Maulana and Ahmady (2022) yang menekankan bahwa ketidakmampuan mengalokasikan sumber daya secara optimal dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Kompleksitas sumber daya dalam implementasi kebijakan melibatkan interaksi dinamis antara kapasitas kelembagaan, kompetensi individu, dan mekanisme pendukung. Sulila (2021) dalam risetnya menegaskan bahwa sumber daya bukan sekadar input, melainkan modal strategis yang menentukan transformasi kebijakan. Dimensi kritis yang perlu dipertimbangkan meliputi kualifikasi SDM, ketersediaan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kemampuan adaptasi organisasional. Sehingga berdasarkan statement dan hasil penelitian di atas, bisa disimpulkan bahwa sumber daya erat kaitannya dengan implementasi. Jika sumber daya tidak tersedia dengan baik maka akan mengganggu keberjalanan implementasi kebijakan ataupun program.

1.6.10 Hubungan Disposisi (X3) dan Implementasi

Disposisi merupakan aspek krusial dalam proses implementasi kebijakan publik yang mencerminkan sikap, komitmen, dan karakteristik personal para pelaksana kebijakan. Menurut pandangan Edwards III (1980), disposisi merujuk pada kecenderungan, keinginan, dan kesediaan implementator untuk menjalankan suatu kebijakan secara efektif. Hal ini tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan

teknis, melainkan juga motivasi internal dan dedikasi para aktor kebijakan dalam mentransformasikan tujuan strategis menjadi realitas konkret.

Studi empiris menunjukkan signifikansi disposisi dalam menentukan keberhasilan implementasi. Maulana & Ahmady (2022), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keseriusan pelaksana program menjadi faktor kunci yang memengaruhi kualitas implementasi program KOTAKU di Banda Aceh. Rendahnya komitmen dan motivasi dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, bahkan ketika sumber daya dan infrastruktur telah tersedia secara memadai. Kompleksitas disposisi tidak dapat dipahami secara linear. Terdapat interaksi dinamis antara karakteristik individual, konteks organisasional, dan lingkungan eksternal. Beberapa elemen kunci yang memengaruhi disposisi meliputi: pemahaman mendalam terhadap kebijakan, tingkat komitmen, motivasi internal, kemampuan adaptasi, dan integritas profesional. Sulila (2021) dalam risetnya menegaskan bahwa disposisi bukan sekadar variabel peripheral, melainkan prediktor signifikan keberhasilan implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi memiliki hubungan dan peranan penting dalam implementasi kebijakan ataupun program.

1.6.11 Hubungan Struktur Birokrasi (X4) dan Implementasi

Struktur birokrasi merupakan kerangka organisasional yang menentukan mekanisme implementasi kebijakan publik. Menurut teori Ripley, R. B and Franklin (1986) struktur birokrasi tidak sekadar merujuk pada hierarki formal, melainkan sistem koordinasi, pembagian tugas, dan mekanisme pengambilan keputusan yang memengaruhi efektivitas implementasi. Edward III (1980) dalam

model implementasi kebijakannya mengidentifikasi struktur birokrasi sebagai salah satu variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurutnya, struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama yaitu Standard Operating Procedures (SOP) SOP merupakan prosedur kerja standar yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan suatu kebijakan dan Fragmentasi Birokrasi, merujuk pada pembagian tanggung jawab di antara unit-unit organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Penelitian empiris menunjukkan kompleksitas struktur birokrasi dalam konteks implementasi. Suryani dan Sihombing (2023) mengidentifikasi bahwa kelemahan struktur birokrasi dapat menghambat penanganan permasalahan secara komprehensif. Sehingga untuk mendukung implementasi kebijakan dan program yang optimal diperlukan pembentukan struktur birokrasi yang jelas.

1.6.12 Hubungan Dukungan Masyarakat (X5) dan Implementasi

Dukungan masyarakat merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yang mencerminkan tingkat partisipasi, kepercayaan, dan keterlibatan komunitas dalam proses pembangunan. Menurut perspektif Adisasmita (2006) partisipasi masyarakat tidak sekadar bentuk keterlibatan formal, melainkan proses dialogis yang memberdayakan komunitas. Riset empiris mengungkapkan variasi signifikan dalam pola dukungan masyarakat.

Sedubun et al. (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah, dengan hanya sebagian kecil warga yang terlibat aktif. Kontras dengan hal tersebut, (Delyus and Dian Kurnia Anggreta 2023) menunjukkan potensi positif partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi program pembangunan.

Kompleksitas dukungan masyarakat melibatkan berbagai faktor: tingkat pemahaman, akses informasi, kepercayaan terhadap institusi, dan manfaat yang dirasakan. Penelitian Ramadhan et al. (2022) menegaskan bahwa sosialisasi yang efektif dan transparansi menjadi kunci membangun dukungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan bukan sekadar variabel pasif, melainkan hasil konstruksi sosial yang dinamis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, hal ini sesuai dengan pernyataan Jan Merse yaitu dukungan masyarakat memberikan pengaruh implementasi kebijakan. Terutama dalam penelitian ini, program yang diteliti adalah program yang memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan urbanisasi yang meningkat di berbagai perkotaan di Indonesia salah satunya Kota Semarang. Sehingga berdampak pada kepadatan penduduk di berbagai wilayah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai dan ketersediaan lahan yang terbatas. Kecamatan Semarang Utara menjadi salah satu daerah yang menghadapi masalah ini dikarenakan daerah ini merupakan kawasan industri yang membuat banyak kegiatan berpusat disana karena sumber mata pencaharian. Hal ini diperparah dengan kawasan Semarang Utara yang dekat pesisir serta dataran rendah sehingga cenderung mengalami banjir rob yang kemudian membuat adanya genangan air. Kemudian banyaknya masyarakat yang melakukan pembangunan tempat tinggal di lahan kosong baik secara legal maupun illegal yang kemudian

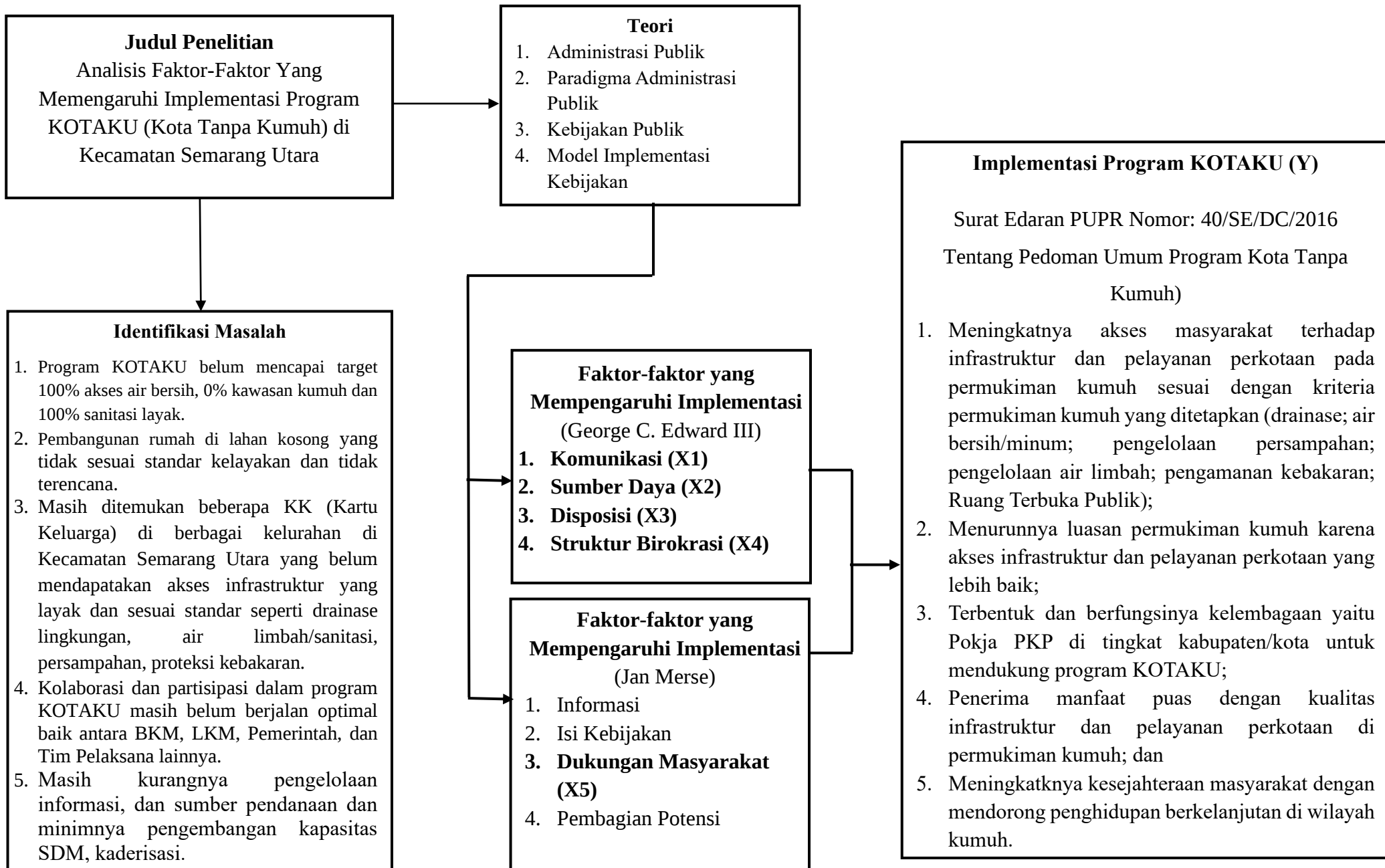
pembangunan terpusat yang tidak terencana dan tidak memenuhi standar yang baik sehingga muncul kawasan permukiman kumuh.

Dalam mengatasi masalah ini pemerintah membentuk program KOTAKU untuk bisa mengentaskan masalah permukiman kumuh, dan penyediaan infrastruktur serta sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memugar kembali daerah-daerah kumuh agar menjadi layak untuk ditempati. Dalam pelaksanaan program KOTAKU ada pedoman yang digunakan yaitu (Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh) yang dikeluarkan oleh PUPR. Namun ternyata, ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga belum terselesaikannya masalah kawasan kumuh. Masalah yang ditemukan seperti keterbatasan sumber daya, proses komunikasi yang masih kurang antara pemerintah dan jajaran pelaksanaannya kemudian masalah kolaborasi, kaderisasi, pengelolaan informasi serta monitoring dan evaluasi yang masih kurang serta masalah lainnya (RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026). Sehingga target yang ingin dicapai dari program KOTAKU untuk 0% kawasan kumuh belum tercapai di Kecamatan Semarang Utara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti akan menggunakan teori Edward III dan Jan Merse untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU dalam penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Semarang Utara. Ada lima faktor yang akan menjadi variabel (X) dalam penelitian ini yaitu komunikasi (X1), sumber daya (X2), disposisi (X3) dan struktur birokrasi (X4) dari teori Edward III dan dukungan masyarakat (X5) dari teori Jan Merse. Hal ini didasari dengan hasil analisis berbagai temuan peneliti terdahulu

menemukan bahwa masalah partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program KOTAKU dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.8 Hipotesis

- H1: Komunikasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara
- H2: Sumber daya secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara
- H3: Disposisi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara
- H4: Struktur birokrasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara
- H5: Dukungan masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara.
- H6: Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Semarang Utara.

1.9 Definisi Konsep

Untuk menjelaskan variabel-variabel dalam hipotesis, maka berikut definisi konsep dari masing-masing variabel tersebut:

1. Implementasi Program KOTAKU (Y)

Implementasi program KOTAKU adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang sebagai upaya penanganan masalah permukiman kumuh yang ada di Semarang Utara. Implementasi program kotaku dalam penelitian ini, akan dianalisis sebagai variabel Y (Dependen) ataupun variabel yang dipengaruhi oleh variabel X (Independen).

Variabel implementasi program KOTAKU dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan Surat Edaran PUPR (Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh). Tujuan utama dari implementasi program KOTAKU adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman kota yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dari pelaksanaan program KOTAKU yaitu:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
- 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan

- 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh

2. Komunikasi (X1)

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui berbagai saluran atau media dengan memperhatikan dimensi transmisi, kejelasan, konsistensi. Pada penelitian ini, komunikasi menjadi salah satu variabel (X) yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap variabel Y (Implementasi Program KOTAKU). Dalam menganalisis pengaruh komunikasi terhadap implementasi program KOTAKU, terdapat tiga dimensi komunikasi, yaitu sebagai berikut:

1) Transmisi (*transmission*)

Transmisi merupakan proses penyampaian informasi yang cepat kepada pelaksana program dan juga penggunaan saluran komunikasi yang tepat untuk menyebarkan informasi terkait program KOTAKU.

2) Kejelasan (*clarity*)

Dimensi kejelasan dalam komunikasi mengacu pada seberapa jelas dan tidak ambigu informasi program yang disampaikan kepada pelaksana program KOTAKU agar maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan/program terlaksana dengan baik.

3) Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi dalam komunikasi merujuk informasi kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana program KOTAKU selaras, tidak

simpang siur dan berubah-ubah, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau salah interpretasi.

3. Sumber Daya (X2)

Sumber daya mencakup semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan program, meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan/fasilitas dan kewenangan. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya manusia merujuk pada staf, fasilitator, BKM/LKM dan pihak-pihak pelaksana program KOTAKU. Kemudian, sumber daya finansial meliputi dana yang tersedia untuk program. Terakhir, sumber daya material meliputi peralatan, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan program KOTAKU.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia meliputi ketersediaan jumlah staf yang cukup dan kemampuan pelaksana kebijakan yang diperlukan untuk menjalankan program KOTAKU.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran adalah ketersediaan dan kecukupan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program KOTAKU dan insentif bagi implementor.

3) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan adalah berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan implementasi program KOTAKU untuk

memudahkan dan mengoptimalkan segala aktivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan program.

4) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya kewenangan adalah dasar otoritas atau kekuasaan yang diperoleh oleh aktor/lembaga pelaksana program KOTAKU yang diakui secara politik.

4. Disposisi/Sikap Pelaksana (X3)

Disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada sikap para pelaksana yang terdiri dari kemauan, keinginan dan kecenderungan secara sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan program KOTAKU.

1) Kemauan Implementor

Kemauan merujuk pada keinginan yang juga memuat komitmen dan motivasi dalam melaksanakan program KOTAKU.

2) Kecenderungan Implementor

Kecenderungan merujuk pada tindakan yang condong mendukung pelaksanaan program KOTAKU dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Struktur Birokrasi (X4)

Struktur birokrasi merupakan sistem hubungan formal yang merupakan wadah interaksi antar pelaksana program KOTAKU yang mencakup dua dimensi penting yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

- 1) *Standar Operating Prosedures* (SOP) adalah standar prosedur kerja yang dikembangkan dan digunakan untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugas-tugas dalam implementasi program KOTAKU.
- 2) Fragmentasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab program KOTAKU kepada beberapa badan, unit dan kelompok kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan progam KOTAKU.

6. Dukungan Masyarakat (X5)

Dukungan masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat lewat dukungan fisik dan non-fisik dalam proses pelaksanaan program KOTAKU.

1) Dukungan fisik

Dukungan yang berupa tindakan nyata dari masyarakat, seperti partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan dalam proyek fisik pelaksanaan program KOTAKU.

2) Dukungan non-fisik

Dukungan yang berupa sikap, persepsi, dan komitmen masyarakat terhadap implementasi program KOTAKU.

1.10 Definisi Operasional

Defenisi operasional merujuk pada perincian dari variabel-variabel kedalam sub variabel/dimensi. Kemudian dimensi ini akan dipecah lagi menjadi indikator-indikator.

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Komunikasi (X1)	Transmisi (<i>Transmission</i>)	1. Informasi terkait program KOTAKU disampaikan dengan cepat kepada pelaksana program KOTAKU. 2. Proses penyampaian informasi kepada pelaksana program KOTAKU menggunakan saluran komunikasi yang tepat
		Kejelasan (<i>Clarity</i>)	1. Pelaksana program KOTAKU menerima informasi dengan jelas dan mudah dipahami 2. Pelaksana program KOTAKU sudah mendapat informasi lengkap memuat maksud, tujuan serta sasaran dari program KOTAKU

		Konsistensi (<i>consistency</i>)	1. Pelaksana program KOTAKU menerima informasi yang selaras dan tidak bertentangan dengan informasi dalam Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. 2. Pelaksana program KOTAKU menerima informasi program KOTAKU dengan tidak berubah-ubah dan tidak simpang siur 3. Pelaksana program KOTAKU menerima informasi yang seragam/tidak berbeda-beda dengan pelaksana lainnya.
2	Sumber Daya (X2)	Sumber Daya Manusia	1. Jumlah staf pelaksana program KOTAKU yang dibutuhkan tersedia dengan cukup 2. Kemampuan SDM yang memadai sebagai pelaksana program KOTAKU
		Sumber Daya Anggaran	1. Ketersediaan dana yang cukup untuk berbagai kegiatan pelaksanaan program KOTAKU 2. Insentif yang sesuai sebagai upah para implementor program KOTAKU
		Sumber Daya Peralatan/Fasilitas	1. Ketersediaan peralatan dan kebutuhan alat untuk pelaksanaan program KOTAKU dengan lengkap dan cukup

			2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelaksana program KOTAKU
		Sumber Daya Kewenangan	1. Pelaksana program KOTAKU memiliki dasar otoritas kekuasaan/wewenang yang jelas dan diakui
3	Disposisi/Sikap Pelaksana (X3)	Kemauan Implementor	1. Keinginan yang tinggi dari para implementor dalam melaksanakan program KOTAKU. 2. Para pelaksana memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan dari program KOTAKU. 3. Semangat dan motivasi kerja yang kuat dari para pelaksana dalam kegiatan pelaksanaan program KOTAKU
		Kecenderungan Implementor	1. Para pelaksana program KOTAKU memiliki tindakan yang condong mendukung pelaksanaan program KOTAKU untuk mencapai tujuannya.
4.	Struktur Birokrasi (X4)	<i>Standard Operating Procedures</i> (SOP)	1. Ketersediaan SOP yang lengkap dan jelas sebagai standar prosedur kerja dalam pelaksanaan program KOTAKU.

			2. Pelaksana program KOTAKU menggunakan SOP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program KOTAKU.
		Fragmentasi	1. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terstruktur kepada pelaksana program KOTAKU baik ditingkat badan, unit dan kelompok kerja pelaksana.
5.	Dukungan Masyarakat (X5)	Dukungan Fisik	1. Banyak masyarakat yang ikut bergabung dalam Komunitas Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/TIPP sebagai pelaksana program KOTAKU 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek fisik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas pelaksanaan program KOTAKU.
		Dukungan non-fisik	1. Respon dan dukungan positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan program KOTAKU 2. Tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan efektivitas dari pelaksanaan program KOTAKU 3. Jumlah dan frekuensi kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan program KOTAKU sebagai komitmen dalam mendukung pelaksanaan program KOTAKU.

6.	Implementasi Program KOTAKU (Y)	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik); 2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; 3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU; 4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh
----	---------------------------------------	--	---

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Data yang dimaksud merujuk pada data empiris atau data yang bisa diamati yang merupakan data dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tipe ini digunakan untuk mendeskripsikan posisi variabel-variabel dengan variabel lainnya. Penggunaan tipe *explanatory research* dikarenakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh ataupun besaran pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

1.11.2 Populasi dan Sampel

1.11.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan ataupun total dari semua subjek yang berasal dari segala hal yang ada dalam sumber penelitian (Nawawi dalam Taniredja, 2014).

Populasi dalam penelitian ini melibatkan semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan Panggung Kidul, Tanjung Mas, Kuninga, Bandarharjo dan Dadapsari yang merupakan daerah di Kecamatan Semarang Utara. Pemilihan lima kelurahan ini dikarenakan kawasan permukimannya masih belum tuntas 0% kawasan kumuh dan juga menjadi daerah yang melakukan kegiatan KOTAKU dengan pemugaran dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi rangkaian dari program KOTAKU. Total populasi

yang diambil adalah seluruh implementor program KOTAKU yang berada di lima kelurahan tersebut, karena dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti melingkupi semua pihak-pihak pelaksana yang berkaitan dalam program KOTAKU mulai dari pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat yang diikutsertakan melalui komunitas/organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Tim Inti Perencana Partisipatif (TIPP). Total populasinya 83 orang.

1.11.2.2 Sampel

Dalam konteks penelitian ini, populasi yang akan diteliti berjumlah 83 orang. Berkaitan dengan populasi tersebut, dikarenakan populasi yang akan diteliti masih di bawah 100 dan dengan pertimbangan waktu dan keterjangkauan responden, maka penulis menggunakan sampel jenuh sebagai teknik pengambilan sampel yaitu semua populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 83 orang. Metode pengambilan sampel jenuh mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Parafrase: Teknik ini sering dipakai dalam suatu penelitian untuk menemukan hasil yang bertujuan untuk membuat generalisasi dalam populasi dengan tingkat kesalahan yang kecil, yaitu kurang dari 30 individu. Setiap orang dalam populasi diambil sebagai sampel dalam metode ini, yang juga disebut sensus (Sugiyono 2018).

1.11.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik sampling jenuh. *Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2018). Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sample apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

1.11.4 Jenis dan Sumber data

1.11.4.1 Jenis Data

a) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merujuk pada data-data angka yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena, gejala ataupun peristiwa yang diukur secara statistik. Data ini diperoleh dari hasil kuesioner yang akan diisi oleh para responden yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b) Data Kualitatif

Data ini adalah data berupa hasil wawancara berupa kata-kata, ada juga gambar, atau suara yang tidak dapat diukur secara objektif. Data ini memberikan informasi yang lebih mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman individu atau kelompok yang menjadi responden dalam penelitian ini.

1.11.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil kuesioner yang disebar dan wawancara dari para responden yang merupakan pelaksana program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi jurnal, artikel ilmiah, buku, dokumen rencana kerja, dokumen statistik, dan dokumen-dokumen dari institusi terkait penyelenggaraan program KOTAKU dan regulasi-regulasi yang mengatur implementasi program tersebut

1.11.5 Skala Pengukuran Data

Skala Likert digunakan oleh peneliti untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terkait fenomena yang sedang diteliti. Skala ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2016:93).

Tabel 1.4 Skala Likert

Skala	Skor
Sangat setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2016) diolah penulis

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, strategi pengumpulan atau teknik mengumpulkan data digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. (Sugiyono, 2016). Teknik yang digunakan yaitu:

1. Teknik Kuesioner

Teknik kuesioner dilakukan dengan menyebarkan lembar pernyataan/pertanyaan secara tertulis kepada para responden untuk mengisi jawaban sesuai dengan pernyataan/pertanyaan yang diberikan.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara juga akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperkaya informasi dan menguatkan hasil atau jawaban dari pertanyaan yang ada di kuesioner dengan menyesuaikan dengan garis-garis besar dari permasalahan di penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada responden terpilih dengan pertimbangan posisi dan pemahaman akan pelaksanaan program KOTAKU dan dilakukan secara terstruktur.

3. Teknik Studi Pustaka

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan program KOTAKU. Studi Pustaka yang dilakukan yaitu terhadap berbagai jurnal artikel yang membahas program KOTAKU untuk memperkaya Informasi dan mendukung pernyataan dalam penelitian ini. Selain jurnal dan artikel, peneliti juga akan meninjau informasi dan dokumen yang ada di Kecamatan Semarang Utara yang berkaitan dengan program KOTAKU, mulai dari dokumen SK Kumuh, dokumen perencanaan, dokumen pelatihan, RAB, dan LPJ pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

4. Teknik Dokumentasi

Selain menyebarkan kuesioner, melakukan studi pustaka, dan wawancara, peneliti juga akan mengumpulkan data dan informasi dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi juga akan dilakukan mengkonfirmasi pernyataan dan jawaban dari responden dengan

melihat dan mendokumentasikan situasi dan kondisi fakta yang ada di lapangan atau lokasi penelitian.

1.11.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kuantitatif. Analisis dilakukan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh dari setiap variabel terkait dengan fenomena yang diteliti. Analisis kuantitatif akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis *Structural Equation Modelling - Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS versi 4. PLS merupakan metode analisis statistika yang kegunaanya mirip dengan SEM. Uji PLS-SEM lebih cocok digunakan pada penelitian dengan jenis studi riset yang memiliki model kompleks dengan data yang terbatas dan tujuan yang bertingkat. Penggambaran konstruk dalam penelitian PLS-SEM dibuat dengan bentuk diagram jalur. Diagram jalur tersebutlah yang akan menggambarkan hipotesis serta hubungan pada setiap variabel penelitian yang akan digunakan untuk pengukuran model persamaan struktural (Hair et al. 2013).

Dalam metode SEM-PLS, ada dua bagian yaitu inner model dan outer model. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, dan outer model digunakan untuk menguji regresi dan koefisien determinasi. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi dampak atau pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara variabel (X1, X2, X3, X4, dan X5) dan variabel (Y). Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini akan menggunakan PLS-SEM dalam tiga tahap: analisis Outer Model, Inner Model dan Pengujian Hipotesis.

1.11.7.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji *outer model* dalam SEM-PLS digunakan untuk melakukan uji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen penelitian. Hair et al. (2018) menerangkan bahwa *outer model* adalah bagian dalam analisis jalur yang memuat hubungan antara setiap indikator terhadap variabelnya. Artinya, *outer model* dapat mendefinisikan bagaimana hubungan pada setiap variabel laten dengan indikatornya. Analisis model pengukuran dilakukan dengan evaluasi nilai dari pengujian berikut:

1. *Convergent Validity*

Convergent validity merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk uji validitas instrumen penelitian. Uji ini dilakukan dengan evaluasi pada nilai *convergent validity* dilakukan dengan mempertimbangkan nilai dari *loading factor* dan nilai AVE. Setiap instrumen penelitian akan diuji dengan syarat nilai untuk *loading factor* yaitu setiap indikator konstruk harus memenuhi nilai >0.70 untuk penelitian *confirmatory*, dan $>0,60$ untuk penelitian *explanatory* agar bisa dikatakan valid. Kemudian untuk nilai AVE (*Average Variance Extracted*) dari konstruk dinyatakan valid apabila nilainya $>0,50$ (Hair et al., 2017). Hasil uji validitas *convergent validity* dijabarkan sebagai berikut

2. *Discriminant Validity*

Berikutnya dilanjutkan dengan melakukan pengujian *discriminant validity*. Uji ini dapat diketahui dengan mengevaluasi nilai AVE pada *Fornell-Larcker Criterion*, nilai *Cross Loading* dan evaluasi nilai korelasi

Heterotrait-Monotrait (HTMT) (Hair et al., 2017). Kriteria yang harus dipenuhi adalah akar AVE > korelasi variabel laten dan *cross loading* > 0,7. Evaluasi nilai pada *fornell-larcker criterion* bertujuan untuk memastikan setiap konstruk berbeda dengan yang lain. Syarat agar nilai dari *fornell-larcker criterion* diterima adalah nilai dari akar kuadrat AVE dari setiap konstruk harus lebih besar dari korelasinya dengan konstruk yang lain (Hair et al., 2017). Kemudian pengujian nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) adalah asumsi mengenai korelasi sebenarnya pada dua konstruksi, apabila keduanya diukur secara keseluruhan. Studi riset oleh Henseler (dalam Hair et al., 2018) menyatakan bahwa HTMT dinilai lebih akurat dalam menguji validitas diskriminan. Nilai HTMT terbaik adalah berada di bawah angka 0.850 untuk mencapai syarat validitas diskriminan, sedangkan apabila nilai HTMT di atas 0.850 maka validitas diskriminan tidak tercapai (Hair et al. 2018).

3. *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha, yang merupakan batas bawah, dan Composite Reliability merupakan batas atas, digunakan untuk mengevaluasi uji reliabilitas. Untuk menentukan reliabilitas konstruk, nilai reliabilitas komposit harus melebihi 0.70 untuk setiap variabel. Selanjutnya, pengujian reliabilitas akan diperkuat dengan nilai alfa cronbach yang harus melebihi 0.70 untuk setiap variabel (Hair et al. 2017).

1.11.7.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural adalah jenis analisis yang digunakan untuk memeriksa hubungan kausalitas antar variabel laten yang dibangun, yang didasarkan pada substansi teori. Uji ini dilakukan pada model struktural ini dengan bantuan prosedur Bootstrapping dan SMART PLS (Abdillah & Hartono, 2015):

1. Koefisien Determinasi (*R-square*/ R^2)

Nilai *R-square* digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variabilitas data yang diamati. Nilai R^2 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 0.75, 0.50, dan 0.25 dengan kesimpulan bahwa model kuat, sedang, dan lemah (Hair et al. 2018).

2. *Effect Size (f-square)*

F-square (effect size) adalah nilai untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Hair et al., (2017), penilaian *f-square* dikategorikan menjadi tiga yaitu: bernilai yakni $< 0,02$ berarti pengaruh rendah, $0,02 - 0,15$ berarti pengaruh moderat/ sedang, $0,151 - 0,35$ diartikan pengaruh tinggi.

1.11.7.3 Uji Hipotesis dengan *Path Coefficient*

Uji hipotesis yang dilakukan dengan aplikasi SmartPLS 4.0 dengan melihat nilai dari *t-statistic* dan *p-values* pada *Path coefficient*. Pengujian dilakukan dengan teknik bootstrapping dengan 5000 subsamples. Pendekatan *two tailed* digunakan dalam penelitian ini karena arah hipotesis belum diketahui.

Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0.05, dimana hal ini mengindikasikan bahwa terdapat probabilitas 95% kebenaran dan 5% kesalahan dalam setiap pengujian yang dilaksanakan. Nilai t-statistik yang digunakan adalah 1.96, yang ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi 5% tersebut. Suatu indikator dapat dinyatakan valid apabila nilai t-statistik melebihi 1.96. Terkait kriteria signifikansi, hal ini akan ditentukan melalui p-value, yang artinya nilai p-value <0.05 menunjukkan signifikansi, sementara nilai yang melebihi 0.05 mengindikasikan ketidaksignifikanan.